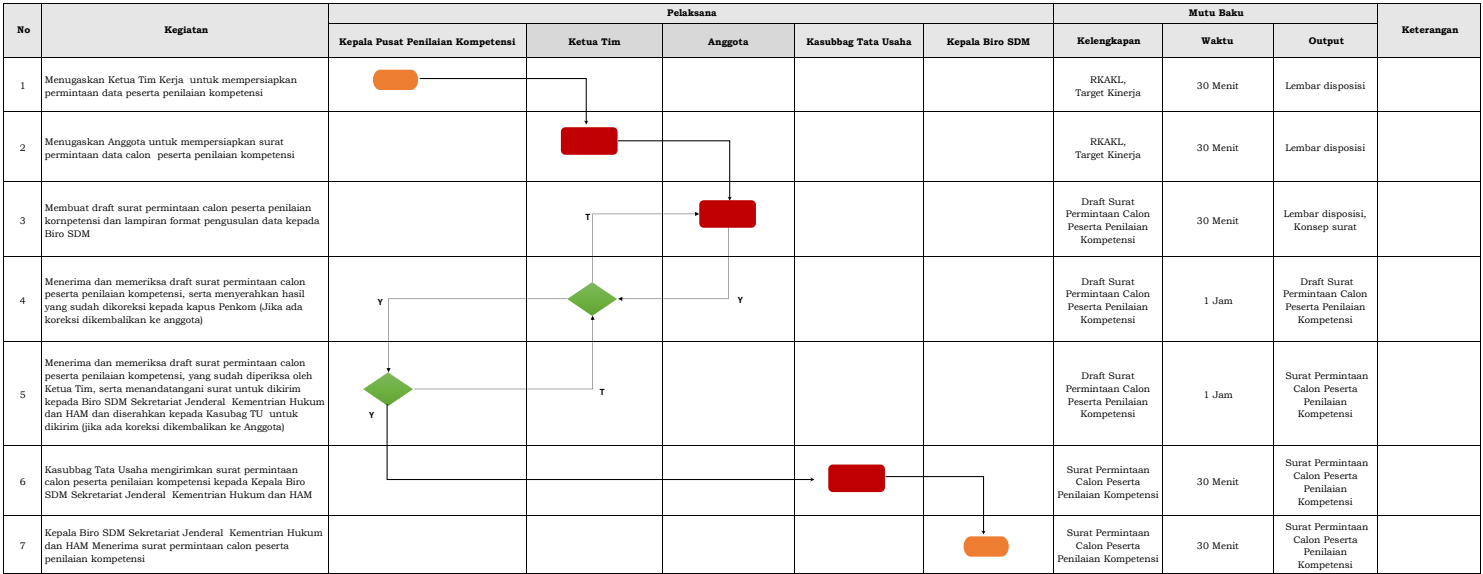


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN CALON PESERTA PENILAIAN KOMPETENSI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BP3DM HUKUM DAN HAM PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	NOMOR SOP	SUM-270-07.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	25 MEI 2022
	TANGGAL REVISI	15 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DIBAHKAN OLEH	KEPALA BP3DM HUKUM DAN HAM,  RAZLI NIP 196511281991031002
	NAMA SOP	PERMINTAAN CALON PESERTA PENILAIAN KOMPETENSI
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;	1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi pelaksanaan penilaian kompetensi;	
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;	2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja;	
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;	3. Memahami dan mengetahui mekanisme permintaan calon peserta penilaian kompetensi	
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;		
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyelenggaraan Birokrasi;		
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan HAM;		
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;		
8. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
KETERANGAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DISBURSMENT PLAN, KALENDER KEGIATAN DAN RENCANA KERJA KAS	1. Peraturan Perundang-undangan	
2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DAN POSTUR RENCANA ANGGARAN BAYAN PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	2. Alat Tulis	
	3. Komputer /Printer	
	4. Jaringan Internet	
	5. Standar Ruang Meeting	
PERINGATAN :	PERCATATAN DAN PERSAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat dan tidak berjalan optimal	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SUM-270-07.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	25 MEI 2022
TANGGAL REVISI	15 Mei 2024
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN CALON PESERTA PENILAIAN KOMPETENSI



Mengetahui,
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi

Jusmar
NIP 197405102000121001